

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2015

Drs. Pardiat, Ak.

	
PERPUSTAKAAN	
No. INV.	
Th. Angg.	Cat.
PARAP	TGL.


**Mitra
Wacana
Media**
PENERBIT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I. TAX PLANNING KEWAJIBAN & HAK WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	 1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Kewajiban Menyampaikan SPT	2
1.3. Penerimaan SPT Dan Pengelolaan SPT Oleh KPP	3
1.4. Kriteria SPT. Yang Dilakukan Pemeriksaan	3
1.5. Pembukuan WP	4
1.6. Pemeriksaan Pajak	5
1.7. Jumlah Kredit Pajak Penghasilan:	6
1.8. Kompensasi Rugi Fiskal	9
1.9. PPh. Pasal 25 Per Bulan	10
1.10. Kredit Pajak Luar Negeri	11
1.11. PPh Ditanggung Pemerintah	11
1.12. Perpanjangan Penyampaian SPT PPh. Badan	12
1.13. Pembetulan SPT, PPh Badan	12
1.14. Transaksi Antara Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Satu Group)	13
1.15. Tatacara Keberatan	13
1.16. Tata Cara Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi & Pengurangan/Pembatalan SKP/STP Yang Tidak Benar	13
1.17. Peraturan MKRI No.198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu	14
1.18. Peraturan MKRI No. 129/PMK.03/2012 Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan (TPP)	14
1.19. Tata Cara Penagihan	14

1.20. Tata Cara Pemeriksaan Buper TPP	14
1.21. Peraturan MKRI No. 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (<i>mutual Agreement Procedure</i>) P3B (<i>Tax Treaty</i>)	14
1.22. Tata Cara Restitusi Pajak	14
1.23. Imbalan Bunga	14
1.24. Peraturan MKRI No. 10/PMK.03/2013 diganti dengan No. 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.	15
1.25. Gugatan Ke Pengadilan Pajak	15
1.26. Banding Ke Pengadilan Pajak	15
1.27. Pengajuan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung	18
1.28. <i>Yudicial Review</i> Ke Mahkamah Agung	19
 BAB II. PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN PPN & PAJAK PENGHASILAN ...	21
2.1. Pajak Pertambahan Nilai: UU No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga UUPPN	21
2.2. Pajak Penghasilan	24
 BAB III. PENGHASILAN DAN BIAYA	55
3.1. Perubahan UU PPh. 1984.	55
3.2. Penghasilan	55
3.3. Laba Bruto Usaha & Laba Usaha	61
3.4. Penghasilan Kena Pajak	62
3.5. Biaya Yang Dapat Dikurangkan	62
3.6. Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan.	65
3.7. Pasal 31E ayat (1) UU No.36 Tahun 2008	68
 BAB IV. PENYUSUTAN FISKAL & AMORTISASI FISKAL	69
4.1. Penyusutan Fiskal	69
4.2. Amortisasi Fiskal	78
 BAB V. REKONSILIASI LABA RUGI FISKAL EQUALISASI SPT PPH WP BADAN	83
5.1. Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal Dan Equalisasi Dengan Pemotongan PPH Pihak Lain Dan PPN	83
5.2. Peredaran Usaha	85
5.3. Pembelian, Harga Pokok Penjualan Dan Persediaan	87
5.4. Impor	89

5.5. Equalisasi Dan Rekonsiliasi Antara Jumlah Penyerahan Menurut SPT. Masa PPN (12 Bulan) Dengan Jumlah Peredaran Usaha Menurut SPT. Tahunan PPH.....	89
5.6. Biaya, Gaji, Upah, Bonus, Honorarium, Thr, Dan Sebagainya..	95
5.7. Biaya Transportasi.....	99
5.8. Biaya Penyusutan Dan Amortisasi.....	99
5.9. Biaya Sewa.....	99
5.10. Biaya Bunga Pinjaman.....	100
5.11. Biaya Sehubungan Dengan Jasa.....	100
5.12. Kerugian Piutang Tak Tertagih.....	101
5.13. Biaya Royalti Atau Imbalan Atas Penggunaan Hak.....	102
5.14. Biaya Promosi Dan Penjualan	102
5.15. Biaya Entertainment	103
5.16. Sumbangan.....	104
5.17. Zakat	105
5.18. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	105
5.19. Biaya Kantor.....	105
5.20. Biaya Listrik, Telepon, Air.....	105
5.21. Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan Dengan Pajak Keluaran	106
5.22. Gaji Anggota Persekutuan, Firma, CV	106
5.23. Gaji Pegawai Yang Merupakan Pemegang Saham	107
5.24. Dividen Terselubung.....	107
5.25. Laba (Rugi) Selisih Kurs Valuta Asing.....	108
5.26. Biaya Lain-lain.....	114

BAB VI. DEBT EQUITY RATIO (DER) MULAI TAHUN 2016

DAN REVALUASI AKTIVA TETAP	115
6.1. Perbandingan Hutang Dan Modal (DER)	115
6.2. Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap	117
6.3. PSAK 16: Pengukuran Setelah Pengakuan.	121

BAB VII. STUDI KASUS SPT PPH BADAN TAHUN 2015

REKONSILIASI FISKAL

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA.....